

## **Penguatan Kapasitas Ekonomi Keluarga Rentan sebagai Bentuk Early Warning System Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Nugrahini Susantinah Wisnujati<sup>1\*</sup>, Suharnanik Suharnanik<sup>2</sup>,**  
<sup>1,2</sup> Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: wisnujatinugrahini@uwks.ac.id<sup>1\*</sup>, nanik\_fisip@uwks.ac.id<sup>2</sup>

\*corresponding author

### **Abstract**

*Domestic violence (DV) remains a serious issue in Indonesia, particularly among vulnerable families experiencing economic hardship. Financial vulnerability often intensifies household tensions and heightens the risk of DV. This article reflects on the axiological dimension of academic community service in strengthening the economic capacity of vulnerable families as an early warning system (EWS) for domestic violence. The study aims to contribute concretely to DV prevention through economic empowerment while examining the effectiveness of participatory approaches in fostering family resilience. The research employed the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, involving vulnerable families, women's community group (PKK) members, and local leaders in Tejoasri Village, Lamongan, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, participatory mapping, and transect walks. The findings reveal that strengthening economic skills particularly through sewing and handicraft training enhances women's financial independence and broadens their access to social support networks. Economic empowerment not only reduces household financial stress but also serves as a preventive instrument against potential domestic violence. The study concludes that domestic violence is closely linked to families' economic vulnerability. Women's economic empowerment through skills training and small-scale enterprises plays a pivotal role in preventing violence, fostering autonomy, and enhancing women's bargaining power. An integrative socio-economic approach is therefore identified as an effective and ethical strategy for domestic violence prevention.*

**Kata kunci:** *Vulnerable Families, Economic Empowerment, Domestic Violence, Early Warning System*

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama bagi keluarga rentan yang menghadapi tekanan ekonomi. Kerentanan finansial kerap memperburuk ketegangan dalam rumah tangga dan meningkatkan risiko KDRT. Artikel ini merefleksikan aksiologi pengabdian dosen dalam memperkuat kapasitas ekonomi keluarga rentan sebagai bentuk early warning system (EWS) KDRT. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata terhadap pencegahan KDRT melalui pemberdayaan ekonomi sekaligus menguji efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan melibatkan keluarga rentan, kader PKK, dan tokoh masyarakat di Desa Tejoasri, Lamongan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion, pemetaan partisipatif, dan transect walk. Hasil menunjukkan bahwa penguatan keterampilan ekonomi, khususnya pelatihan menjahit dan kerajinan tangan, meningkatkan kemandirian finansial perempuan serta memperluas akses pada jejaring sosial pendukung. Pemberdayaan ekonomi terbukti tidak hanya mengurangi tekanan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi instrumen preventif terhadap potensi KDRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KDRT erat kaitannya dengan kerentanan ekonomi keluarga. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan usaha kecil berperan penting dalam mencegah

kekerasan, meningkatkan kemandirian, serta memperkuat posisi tawar perempuan. Pendekatan integratif ekonomi-sosial menjadi strategi efektif dan etis dalam pencegahan KDRT..

**Kata kunci:** Keluarga Rentan, Pemberdayaan Ekonomi, KDRT, Early Warning System

## **Pendahuluan**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, dengan dampak serius bagi korban maupun masyarakat luas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim sepanjang hidupnya. Data tersebut menunjukkan bahwa KDRT bukanlah fenomena sporadis, melainkan persoalan global yang berakar pada relasi kuasa, budaya patriarki, dan kerentanan sosial-ekonomi. Di Indonesia, persoalan ini juga mengemuka. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Indonesia (BPS, 2016) menemukan bahwa sekitar 33,8% perempuan pernah mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun ekonomi. Angka ini mengindikasikan bahwa KDRT merupakan masalah serius yang menuntut perhatian semua pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

KDRT sering dipahami bukan hanya sebagai peristiwa personal di ruang domestik, melainkan sebagai cerminan struktur sosial yang timpang. Relasi kuasa dalam rumah tangga yang didominasi laki-laki, dibarengi dengan norma budaya yang permisif terhadap kekerasan, memperparah kerentanan perempuan. Namun, faktor ekonomi sering kali muncul sebagai pemicu dominan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, pengangguran, maupun tekanan finansial lainnya dapat meningkatkan konflik pasangan. Beberapa penelitian menegaskan korelasi antara kemiskinan dan KDRT. Vyas dan Watts (2009) menemukan bahwa ketidakstabilan ekonomi meningkatkan risiko kekerasan pasangan. Demikian pula Heise (2011) menyatakan bahwa tekanan finansial memperbesar potensi terjadinya kekerasan. Di Indonesia, Lestari (2017) menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang buruk memperburuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan.

Keluarga rentan, terutama yang berada pada garis kemiskinan, menghadapi risiko berlapis. Pertama, keterbatasan akses pada sumber daya ekonomi membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, beban psikososial akibat keterbatasan tersebut kerap melahirkan konflik internal. Ketiga, lemahnya jejaring sosial dan institusi pendukung membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kekerasan. Dengan demikian, keluarga rentan menjadi kelompok yang paling berisiko mengalami dan mewariskan siklus KDRT antar generasi.

Meski relasi antara faktor ekonomi dan KDRT telah banyak dikaji, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek dampak, bukan pada intervensi preventif yang konkret. Literatur mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga rentan sebagai strategi pencegahan KDRT masih terbatas, khususnya di Indonesia. Padahal, peningkatan kapasitas ekonomi dapat berfungsi ganda: mengurangi ketegangan finansial dalam rumah tangga sekaligus memperkuat posisi tawar perempuan. Inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) yang ingin dijawab dalam artikel ini. Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan bentuk tanggung jawab etis, sosial, dan aksiologis. Aksiologi, sebagai dimensi filsafat yang membicarakan nilai dan kebermanfaatannya, menjadi relevan ketika dosen melakukan pengabdian yang tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Refleksi aksiologi dalam konteks ini menekankan bagaimana ilmu sosial, khususnya sosiologi, dapat diterjemahkan ke dalam program pemberdayaan yang memberdayakan keluarga rentan sekaligus mencegah KDRT.

Artikel ini lahir dari praktik pengabdian masyarakat di Desa Tejoasri, Kabupaten Lamongan, yang menjadi lokasi penelitian sekaligus intervensi. Desa ini dipilih karena memiliki jumlah keluarga rentan cukup tinggi dan kasus KDRT yang teridentifikasi oleh aparat desa maupun kader PKK.

Melalui metode partisipatif, yakni Participatory Rural Appraisal (PRA), tim dosen berupaya menggali kondisi sosial-ekonomi masyarakat, memetakan kerentanan, sekaligus merancang program pemberdayaan ekonomi yang kontekstual. Pendekatan ini memastikan keterlibatan aktif masyarakat sehingga solusi yang dihasilkan tidak bersifat top-down, melainkan lahir dari kebutuhan riil warga. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan mencakup pelatihan keterampilan menjahit, kerajinan tangan, dan kewirausahaan sederhana yang sesuai dengan potensi lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri perempuan serta memperluas akses mereka pada jejaring sosial. Lebih jauh, pemberdayaan ini diposisikan sebagai early warning system (EWS) KDRT, karena dengan adanya kemandirian finansial, perempuan lebih mampu mengenali, mencegah, bahkan mengambil tindakan terhadap potensi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dinamika KDRT pada keluarga rentan; (2) menganalisis peran faktor ekonomi dalam memperkuat atau melemahkan kerentanan tersebut; (3) merefleksikan praktik pengabdian dosen dalam membangun kapasitas ekonomi keluarga rentan sebagai strategi preventif terhadap KDRT; dan (4) menegaskan urgensi dimensi aksiologi dalam setiap praktik pengabdian masyarakat.

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi akademik dalam mengisi gap penelitian, tetapi juga pada kontribusi praktis dalam menghadirkan model intervensi yang dapat direplikasi di wilayah lain. Lebih jauh, artikel ini diharapkan memperkuat diskursus bahwa pemberdayaan ekonomi adalah bagian integral dari upaya perlindungan perempuan dan keluarga dari kekerasan. Dengan perspektif aksiologi, pengabdian dosen tidak hanya menghadirkan solusi pragmatis, tetapi juga meneguhkan nilai kemanusiaan, keadilan gender, dan kesejahteraan sosial.

## **Metode Penelitian**

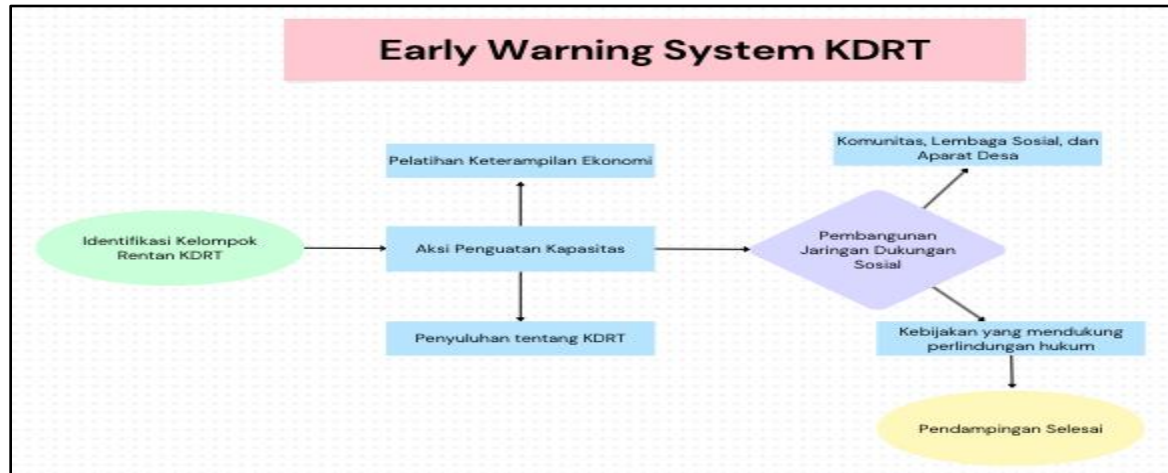
Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan solusi kepada keluarga rentan, tetapi juga untuk menggali dimensi aksiologi dari pengabdian dosen. Refleksi aksiologi dalam penelitian ini menyoroti pentingnya peran dosen dalam membangun kesadaran sosial, memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan pencegahan KDRT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang merupakan metode partisipatif yang melibatkan komunitas dalam proses pengumpulan data dan analisis untuk memahami masalah yang dihadapi serta mencari solusi yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi mereka. PRA berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang mereka hadapi, termasuk dalam konteks keluarga rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini dilakukan di daerah pedesaan dengan populasi keluarga rentan yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, yang berpotensi menjadi korban KDRT. Partisipan terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, serta anggota masyarakat lainnya yang terkait dengan isu KDRT. Pemilihan partisipan dilakukan berdasarkan kriteria kerentanannya terhadap kemiskinan dan potensi KDRT.

Langkah pertama yang dilakukan dalam menggali adalah indepth interview, peneliti saat melakukan intervensi program pelatihan menjahit sekaligus melakukan wawancara mendalam kepada keluarga rentan untuk menggali informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga, pengalaman terhadap KDRT, dan pandangan mereka tentang sistem peringatan dini (early warning system). Kedua, FGD (Focus Group Discussion), diskusi ini melibatkan anggota masyarakat dan tokoh lokal seperti sesepuh desa Tejoasri untuk mendalami permasalahan terkait KDRT dan ekonomi keluarga, serta mencari solusi yang dapat diterapkan dalam konteks lokal. Menggunakan peta untuk menggambarkan sumber daya ekonomi yang ada di komunitas serta masalah yang berhubungan dengan KDRT. Ketiga, dilakukan pemetaan partisipatif, bersama-sama dengan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap potensi sumber daya dan tantangan yang ada. Keempat, dilakukan Transect Walk, metode ini dilakukan untuk penelusuran lapangan dilakukan

untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keluarga rentan, serta melihat langsung potensi dan hambatan yang ada di lingkungan sekitar.

Data yang diperoleh dari wawancara, FGD, pemetaan partisipatif, dan transect walk dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari partisipasi masyarakat. Proses analisis dilakukan secara kolaboratif bersama anggota masyarakat untuk memastikan bahwa interpretasi data mencerminkan perspektif mereka.



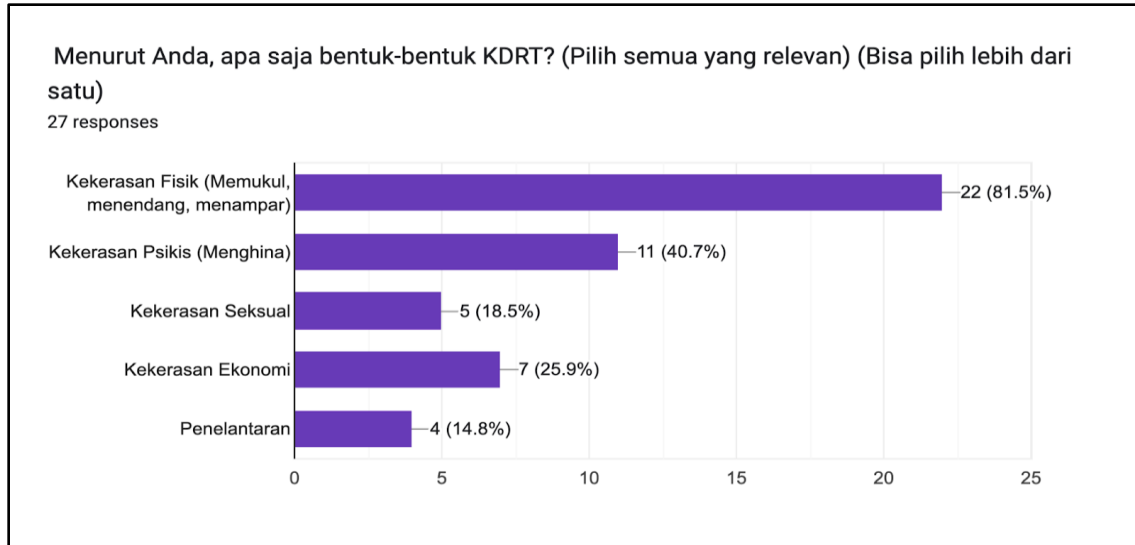
Sumber: Penulis, 2025

**Gambar 1. Flowchart Early Warning System KDRT**

Dari gambar 1. Flowchart yang menggambarkan Early Warning System KDRT ini menggambarkan proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada keluarga rentan. Langkah pertama adalah identifikasi kelompok rentan KDRT, yang bertujuan untuk mengidentifikasi keluarga yang memiliki potensi menjadi korban KDRT. Hal ini penting agar intervensi dapat diberikan secara tepat sasaran. Setelah itu, dilakukan aksi penguatan kapasitas, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu pelatihan keterampilan ekonomi dan penyuluhan tentang KDRT. Pelatihan keterampilan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, sementara penyuluhan memberikan informasi dan kesadaran tentang tanda-tanda KDRT, dampaknya, serta cara mencegah dan melaporkannya. Selanjutnya, dibangun jaringan dukungan sosial yang melibatkan komunitas, lembaga sosial, dan aparat desa. Jaringan ini bertujuan untuk menyediakan dukungan emosional dan akses ke sumber daya yang dapat membantu keluarga rentan mengatasi masalah KDRT. Selain itu, dibentuk pula kebijakan yang mendukung perlindungan hukum, guna memastikan korban KDRT mendapatkan perlindungan yang memadai. Langkah terakhir dalam flowchart ini adalah pendampingan selesai, yang berarti keluarga yang telah mendapat dukungan dan intervensi akan terus dipantau untuk memastikan bahwa mereka tidak lagi berada dalam situasi yang rentan terhadap KDRT, dan masalah tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Dengan demikian, sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada keluarga rentan melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga



**Gambar 2. Bentuk KDRT yang terjadi Pada Keluarga**

Dari gambar 2. menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan fisik (82.5%), diikuti dengan kekerasan psikologis (59.2%), dan kekerasan ekonomi (18.5%). Dari data ini diperkuat dengan riset yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan fisik dan psikologi (Syahroni & Yudianto, 2022) dan (Syamsiah, 2024). Data ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk KDRT yang paling umum, namun kekerasan non-fisik juga cukup signifikan. Dalam UU nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus perceraian yang terjadi tahun 2022 diakibatkan oleh KDRT adalah sebanyak 53 kasus (BPS, 2022). KDRT di Indonesia banyak dilakukan di dalam institusi keluarga, tempat-tempat umum bahkan dalam institusi pendidikan. Sementara pelakunya didominasi oleh laki-laki memiliki hubungan relasi sosial terdekat seperti suami, pacar bahkan teman (KPPPA, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mendapat ancaman secara fisik dan psikologi dari lingkungan terdekatnya dimana ia berada, tidak menutup kemungkinan wilayah tersebut amat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat luas bahkan negara karena kejadiannya adalah di dalam ruang privat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang sebagian besar bermanifestasi sebagai kekerasan fisik, tetapi juga mencakup contoh signifikan pelecehan psikologis dan ekonomi. Prevalensi kekerasan fisik, dilaporkan sebesar 82,5%, menggarisbawahi dominasinya sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling umum, diikuti oleh kekerasan psikologis (59,2%) dan kekerasan ekonomi (18,5%) (Marizal & Hasibuan, 2023) (Singh, 2017). Pola kekerasan ini berakar kuat pada norma sosial dan dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, sering diperburuk oleh faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan, dan sikap budaya terhadap peran gender (Susana & Rifandi, 2021) (Setyaningrum & Arifin, 2019). Kerangka hukum, termasuk UU No. 23 tahun 2004, bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan mendefinisikan dan melarang berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, namun tantangan tetap ada dalam penegakan hukum dan penerimaan masyarakat (Pasaribu et al., 2024) (Hasan et al., 2023).

Prevalensi dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang paling banyak dilaporkan, kekerasan fisik termasuk tindakan seperti penyerangan dan kekerasan. Hal ini sering terlihat dan

dengan demikian lebih mungkin dilaporkan dan didokumentasikan (Marizal & Hasibuan, 2023) (Singh, 2017). Kekerasan psikologis seperti ancaman, penghinaan, dan bentuk pelecehan emosional lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang signifikan. Meskipun kurang terlihat, itu adalah komponen penting dari kekerasan dalam rumah tangga yang mempengaruhi kesehatan mental korban (Hasan et al., 2023) (Setyaningrum & Arifin, 2019). Sementara kekerasan ekonomi lebih jarang dilaporkan, pelecehan ekonomi melibatkan pengendalian akses mitra ke sumber daya keuangan, sehingga membatasi kemandirian dan kemampuan mereka untuk melarikan diri dari situasi yang kasar (Postmus et al., 2020).

Dalam konteks hukum dan dinamika sosial terdapat UU No. 23 tahun 2004 memberikan dasar hukum untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup pelecehan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Namun, penegakan hukum sering terhalang oleh norma-norma sosial dan sifat pribadi dari pengaturan domestik (Pasaribu et al., 2024)(Susana & Rifandi, 2021). Sementara dinamika sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga sering diabadikan oleh peran gender tradisional dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga. Laki-laki biasanya pelakunya, dengan perempuan dan anak-anak menjadi korban utamanya (Haseena, 2015) (Siregar & Harisman, 2024).

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah faktor sosioekonomi. Stres ekonomi dan pencapaian pendidikan yang rendah merupakan kontributor signifikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini dapat memperburuk ketegangan dalam rumah tangga, yang menyebabkan peningkatan kasus kekerasan (Setyaningrum & Arifin, 2019). Selain itu norma budaya seperti sikap budaya yang memaafkan atau meremehkan kekerasan terhadap perempuan berkontribusi pada persistensi kekerasan dalam rumah tangga. Norma-norma ini sering membuat korban enggan mencari bantuan karena takut akan stigma atau dampakan (Haseena, 2015).

Banyak korban tidak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga karena takut stigma sosial atau kurangnya kepercayaan pada sistem hukum. Pelaporan yang kurang ini memperumit upaya untuk mengatasi dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (Hasan et al., 2023). Selain itu sistem pendukung meskipun terdapat langkah-langkah hukum, ada kebutuhan untuk sistem pendukung yang lebih komprehensif, termasuk layanan konseling dan rehabilitasi, untuk membantu korban pulih dari pelecehan (Afdal, 2015). Sementara kerangka hukum di Indonesia menyediakan mekanisme untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, sikap masyarakat dan tantangan penegakan hukum terus menghambat kemajuan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga harus mencakup tidak hanya reformasi hukum tetapi juga inisiatif budaya dan pendidikan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mendukung korban secara efektif.

## B. Jenis Keterampilan yang Diminati untuk Program Pemberdayaan Perempuan



Gambar 3. Jenis-jenis Keterampilan yang diminati untuk Program Pemberdayaan, Desa Tejoasri Tahun 2024.

Berdasarkan Gambar 3, mayoritas responden (33,3%) memilih keterampilan menjahit sebagai program pemberdayaan yang paling diminati, diikuti oleh kerajinan tangan (29,6%) dan keterampilan lainnya. Hal ini mencerminkan preferensi perempuan di Desa Tejoasri untuk keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan rumahan dan usaha kecil yang dapat dilakukan di rumah, yang sejalan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Desa Tejoasri, yang terletak di Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu KDRT, khususnya di kalangan perempuan yang tergabung dalam kelompok PKK. Pemberdayaan ekonomi perempuan di desa ini sangat terkait dengan peran penting program PKK, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keterampilan perempuan di bidang usaha rumahan dan bisnis skala kecil. Melalui pelatihan yang terstruktur, PKK bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan motivasi anggotanya untuk memulai serta mengelola kegiatan ekonomi produktif (Suharnanik & Yulairini, 2022; Tandaju et al., 2022). Peningkatan kemandirian ekonomi ini tidak hanya berdampak positif pada kesejahteraan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memberikan akses ke informasi dan dukungan psikososial melalui peran aktif kader PKK.

Preferensi untuk keterampilan menjahit sebagai program pemberdayaan yang paling diinginkan di kalangan perempuan di Desa Tejoasri mencerminkan tren yang lebih luas dari inisiatif pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat yang berfokus pada keterampilan terkait pekerjaan rumah. Preferensi ini sejalan dengan komitmen desa untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam rumah tangga dan memberdayakan perempuan secara ekonomi melalui program PKK. Program PKK telah berperan penting dalam meningkatkan keterampilan perempuan dalam bisnis berbasis rumah dan skala kecil, yang sangat penting untuk kemandirian finansial dan kesejahteraan keluarga mereka. Tren ini didukung oleh berbagai penelitian yang menyoroti efektivitas program pelatihan menjahit dan kerajinan tangan dalam memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial.

Keterampilan menjahit sebagai program pemberdayaan pilihan, karena masih menjadi kegiatan kerumahtanggaan. Selain itu keterampilan menjahit sangat dihargai karena memberi wanita kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari rumah, yang sangat penting bagi mereka yang memiliki tanggung jawab rumah tangga. Program pelatihan menjahit telah terbukti secara signifikan meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi peserta, sebagaimana dibuktikan oleh hasil positif dari program-program tersebut di Kota Serang dan Kabupaten Lombok Timur (Sugana & Sudrajat, 2023) (Aprianti & Herlina, 2024). Antusiasme dan partisipasi perempuan dalam program pelatihan menjahit menunjukkan permintaan yang kuat untuk keterampilan ini, yang dipandang sebagai jalur menuju kemandirian finansial dan peningkatan kesejahteraan keluarga (Ismuhadi et al., 2022).

Kerajinan tangan dan keterampilan lainnya seperti pelatihan kerajinan tangan, tambal sulam dan merajut, juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan dengan memberi mereka keterampilan kreatif dan kewirausahaan. Program-program ini dirancang agar dapat diakses dan dikelola bersama tugas rumah tangga, membuatnya cocok untuk wanita yang perlu menyeimbangkan beberapa peran (Yulistyawati et al., 2017) (Masruroh & Sadhie, 2024). Pengembangan keterampilan kerajinan tangan tidak hanya meningkatkan kreativitas perempuan tetapi juga berkontribusi pada pendapatan keluarga, seperti yang terlihat dalam program pemberdayaan di Desa Malang dan Karangpatihan (Mujahidin & Nugroho, 2024).

Peran PKK dan program berbasis pada masyarakat sangat penting dalam memfasilitasi inisiatif pemberdayaan ini dengan menyelenggarakan dan mendukung sesi pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan untuk bisnis berbasis rumah. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas yaitu pemberdayaan masyarakat dan ketahanan ekonomi (Khairuunnisa, 2017). Program berbasis masyarakat, seperti yang menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD), menekankan pemanfaatan sumber daya dan keterampilan lokal untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian di kalangan perempuan (Masruroh & Sadhie, 2024) (Fahimah & Alfiah, 2023).

Sementara fokus pada menjahit dan kerajinan tangan bermanfaat, penting untuk mempertimbangkan potensi keterbatasan program ini. Misalnya, kurangnya dukungan pemerintah dan fasilitas yang memadai dapat menghambat efektivitas inisiatif pelatihan, sebagaimana dicatat dalam program Kota Serang (Sugana & Sudrajat, 2023). Selain itu, sementara keterampilan ini memberikan manfaat ekonomi langsung, ada kebutuhan untuk evaluasi berkelanjutan dan peningkatan program untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Meskipun demikian, efektivitas program PKK dalam mengatasi isu KDRT masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan kemampuan kader dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, serta kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganannya (Suharnanik & Yulairini, 2022). Hal ini berdampak langsung pada kemampuan kader untuk memberikan intervensi yang tepat kepada korban KDRT, yang pada akhirnya melemahkan peran perlindungan sosial yang dijalankan oleh organisasi ini (Stiawati & Indriyany, 2022). Oleh karena itu, meskipun program PKK telah menunjukkan perkembangan positif dalam pemberdayaan ekonomi, penguatan kapasitas kader melalui pelatihan lanjutan serta penyediaan sumber daya yang cukup untuk menangani kekerasan berbasis gender masih sangat diperlukan. Pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek ekonomi dan sosial ini menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan komunitas secara menyeluruh. Berdasarkan data dan kajian pustaka sebelumnya, terdapat hubungan yang erat antara keterampilan ekonomi yang menghasilkan produk dan kemampuan perempuan untuk melindungi diri dari kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan ekonomi, meskipun persentasenya lebih kecil, memiliki relevansi khusus dalam penelitian ini. Bentuk kekerasan ekonomi yang teridentifikasi antara lain adalah pembatasan akses perempuan terhadap uang belanja, kontrol penuh atas sumber pendapatan keluarga oleh suami, hingga pelarangan bagi perempuan untuk bekerja atau berwirausaha. Situasi ini mengindikasikan bahwa masalah ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai pemicu konflik, tetapi juga sebagai arena kekerasan itu sendiri. Ketika perempuan tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, maka posisi tawarnya dalam keluarga melemah, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan. Analisis faktor ekonomi semakin menguatkan pentingnya penguatan kapasitas ekonomi keluarga rentan. Hasil wawancara mendalam dengan partisipan menunjukkan bahwa mayoritas konflik rumah tangga muncul karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan pangan, dan kesehatan. Tekanan ini sering kali memunculkan pertengkaran, bahkan kekerasan fisik, terutama ketika laki-laki sebagai kepala keluarga merasa gagal menjalankan peran penyedia nafkah. Dalam kondisi seperti ini, pemberdayaan ekonomi bukan sekadar strategi meningkatkan pendapatan, tetapi juga strategi pencegahan KDRT melalui pengurangan stres finansial. Hal ini sesuai dengan temuan Heise (2011) yang menegaskan bahwa kestabilan ekonomi keluarga dapat mengurangi risiko kekerasan pasangan intim.

Dalam konteks pemberdayaan, preferensi masyarakat terhadap jenis keterampilan tertentu juga menjadi temuan penting. Berdasarkan hasil FGD dan pemetaan partisipatif, mayoritas perempuan di Desa Tejoasri lebih memilih keterampilan menjahit (33,3%) dan kerajinan tangan (29,6%) sebagai program yang diinginkan. Preferensi ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung memilih keterampilan yang dapat dilakukan dari rumah, sejalan dengan peran domestik yang masih melekat kuat. Namun, di sisi lain, pilihan ini juga mencerminkan adanya peluang strategis bagi pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga. Penelitian sebelumnya oleh Aprianti & Herlina (2024) serta Sugana & Sudrajat (2023) membuktikan bahwa pelatihan menjahit mampu meningkatkan kemandirian finansial perempuan sekaligus membuka peluang usaha kecil berbasis komunitas. Temuan di lapangan memperlihatkan adanya hubungan erat antara penguatan ekonomi dengan early warning system (EWS) KDRT. Melalui keterampilan menjahit, misalnya, perempuan

bukan hanya memperoleh tambahan pendapatan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian. Keberanian perempuan untuk berbicara mengenai masalah rumah tangga dalam FGD meningkat setelah mereka terlibat dalam pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi memberi efek ganda: mengurangi tekanan finansial sekaligus memperkuat daya tawar perempuan untuk menolak atau melawan kekerasan. Dengan kata lain, keterampilan ekonomi berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap KDRT, karena semakin mandiri secara finansial, semakin kecil kemungkinan perempuan bergantung sepenuhnya pada pasangan yang potensial menjadi pelaku kekerasan.

Diskusi lebih lanjut memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal. Faktor lain seperti norma budaya, stigma sosial, dan lemahnya penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam mempertahankan siklus kekerasan. Oleh karena itu, strategi penguatan ekonomi perlu dipadukan dengan intervensi sosial dan psikologis. Misalnya, penyuluhan mengenai hak-hak perempuan, konseling keluarga, dan advokasi hukum menjadi komplementer dari program pelatihan keterampilan. Dengan demikian, EWS KDRT berbasis ekonomi dapat berjalan efektif jika didukung oleh ekosistem sosial yang memadai. Dari perspektif aksiologi, keterlibatan dosen dalam pengabdian ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar transfer keterampilan. Refleksi aksiologi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial harus berorientasi pada kebermanfaatan nyata. Dosen tidak hanya hadir sebagai fasilitator pelatihan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan gender. Keterlibatan dalam PRA menunjukkan adanya proses dialogis yang menghargai pengalaman masyarakat, bukan dominasi akademisi. Dengan demikian, pengabdian ini menjadi bukti bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial jika dilandasi nilai-nilai aksiologi yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas ekonomi keluarga rentan berfungsi ganda: mengatasi akar permasalahan finansial yang sering memicu KDRT sekaligus menciptakan mekanisme pencegahan dini berbasis komunitas. Temuan ini mendukung literatur internasional yang menekankan pentingnya intervensi ekonomi dalam pencegahan kekerasan (Vyas & Watts, 2009; Postmus et al., 2020). Namun, keunikan artikel ini terletak pada integrasi dimensi aksiologi, di mana pemberdayaan ekonomi diposisikan sebagai praktik etis dan sosial dosen dalam menghadirkan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.

## **Simpulan dan Saran**

Artikel ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang tidak hanya dipicu oleh faktor budaya dan relasi kuasa, tetapi juga sangat terkait dengan kerentanan ekonomi. Hasil penelitian di Desa Tejoasri menunjukkan bahwa mayoritas keluarga rentan menghadapi tekanan finansial yang berimplikasi langsung pada munculnya KDRT, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun ekonomi. Tekanan ekonomi terbukti menjadi salah satu faktor dominan yang memperburuk konflik rumah tangga dan mendorong lahirnya praktik kekerasan. Dengan demikian, upaya pencegahan KDRT tidak dapat dilepaskan dari strategi penguatan kapasitas ekonomi keluarga. Pemberdayaan ekonomi terbukti memiliki peran ganda dalam konteks ini. Pertama, ia berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian finansial keluarga rentan. Pelatihan menjahit, kerajinan tangan, dan usaha kecil berbasis rumah yang dijalankan perempuan mampu memberikan sumber pendapatan alternatif sekaligus memperluas jejaring sosial. Kedua, pemberdayaan ekonomi juga menjadi early warning system (EWS) yang membantu perempuan mengenali, mencegah, dan merespons potensi KDRT. Dengan adanya kemandirian finansial, perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rumah tangga, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Temuan ini menguatkan literatur internasional yang menegaskan hubungan positif antara stabilitas ekonomi dan berkurangnya risiko kekerasan pasangan intim.

Lebih jauh, penelitian ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga rentan tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sosial kelembagaan. Peran kader PKK, aparat desa, dan tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan program. Meski demikian, kemampuan kader PKK masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal identifikasi tanda-tanda KDRT dan mekanisme intervensi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perlu dipadukan dengan peningkatan kapasitas sosial komunitas serta advokasi kebijakan perlindungan perempuan. Pendekatan yang bersifat integratif ini menjamin bahwa program pemberdayaan tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan sosial dan psikologis bagi keluarga rentan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya mengembangkan model early warning system berbasis ekonomi yang dapat direplikasi di wilayah lain. Pemerintah desa, organisasi perempuan, dan perguruan tinggi dapat menjadikan model ini sebagai rujukan dalam merancang program pencegahan KDRT yang berbasis komunitas. Implikasi akademiknya adalah perlunya memperluas kajian tentang hubungan antara pemberdayaan ekonomi dan pencegahan kekerasan berbasis gender, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif aksiologi. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan teori, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi masalah sosial. Sebagai rekomendasi, keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi harus dijamin melalui dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai. Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan berkelanjutan, sementara perguruan tinggi perlu terus mengembangkan model pengabdian yang berbasis kolaborasi lintas sektor. Selain itu, perlu ada upaya untuk memperkuat literasi gender dan literasi hukum di tingkat komunitas, sehingga pemberdayaan ekonomi benar-benar menjadi instrumen komprehensif dalam pencegahan KDRT. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas ekonomi keluarga rentan merupakan strategi preventif yang efektif sekaligus etis dalam menghadapi KDRT.

## Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, secara khusus LPPM UWKS yang telah mendukung kegiatan penelitian ini secara maksimal, kepada pemerintahan Desa Tejoasri yang membantu terlaksananya kegiatan pengambilan data ini melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Acquah, D., & Thévenon, O. (2020). Delivering evidence based services for all vulnerable families. <https://doi.org/10.1787/1BB808F2-EN>
- Adato, M., & Bassett, L. (2009). Social protection to support vulnerable children and families: the potential of cash transfers to protect education, health and nutrition. *Aids Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of Aids/Hiv*, 21, 60–75. <https://doi.org/10.1080/09540120903112351>
- Afdal, A. (2015). Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. 1(1). <https://doi.org/10.29210/1201528>
- Amirullah, Moh., Farhad, F., Alfarisi, A., & Habibi, M. (2024). Pengabdian Dan Pemberdayaan Keluarga Duafa. <https://doi.org/10.62951/unggulan.v1i3.292>
- Aprianti, W., & Herlina, H. (2024). Implementasi Pelatihan Keterampilan Menjahit Busana Wanita Terhadap Taraf Ekonomi Peserta Pelatihan di LPPK Maherka Kabupaten Lombok Timur. *Transformasi/Transformasi : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal- Informal*, 10(2), 166. <https://doi.org/10.33394/jtni.v10i2.12991>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Indonesia 2016*.

- Bauer, P., & Wiezorek, C. (2016). »Vulnerable Families«: Reflections on a Difficult Category. CEPS Journal: Center for Educational Policy Studies Journal, 6(4), 11–28. <https://doi.org/10.25656/01:12742>
- Bio Dharma Sugana, M. T., & Sudrajat, I. (2023). Evaluasi program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan menjahit di sanggar kegiatan belajar (skb) kota serang. Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2), 11–28. <https://doi.org/10.59066/jppm.v2i2.308>
- Fahimah, S., & Alfiyah, A. (2023). PKM Pendampingan Perempuan Penenun Berbasis Budaya Lokal melalui Self Control. GUYUB. <https://doi.org/10.33650/guyub.v4i3.7147>
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1607>
- Haseena, V.A. (2015). The Dialectical Factor between Violence and Women- A Threatening Factor for the Empowerment. Journal of Law, Policy and Globalization, 36, 69–72. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/21712/21904>
- Heise, L. L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. London School of Hygiene & Tropical Medicine.
- Ismuhadi, Silaturrahmi, Hasanah, Uliatun. (2022). Pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Menjahit bagi Ibu-Ibu PKK. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.58477/pasai.v1i1.5>
- Khairuunnisa, I. (2017). Pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah. <http://eprints.ummi.ac.id/149/>
- Lestari, A. P. (2017). Peran Faktor Ekonomi dalam Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi, 4(2), 45-58.
- Marizal, M., & Hasibuan, Y. (2023). Factors influencing types of domestic violence with multinomial logistic regression. International Journal of Mathematics and Computer Research, 11(03), 3288–3294. <https://doi.org/10.47191/ijmcr/v11i3.02>
- Masruroh, N., & Sadhie, M. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan merajut dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga. <https://doi.org/10.61579/beujroh.v2i1.71>
- Mujahidin, G., & Nugroho, I. A. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Home Industry untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Rumah Tangga di Desa Karangpatihan. Mujahada, 2(2), 74–93. <https://doi.org/10.54396/mjd.v2i2.1689>
- Pasaribu, J. A. B., Marbun, D. I., & Lubis, A. K. (2024). Domestic violence committed by wife to husband. International Journal of Research Publications. <https://doi.org/10.47119/ijrp1001441320246164>
- Peters, C. (2017). Elevating financial capability in child welfare services: Early efforts in the Grand Challenge. Journal of Children and Poverty, 23(2), 177–187. <https://doi.org/10.1080/10796126.2017.1379006>
- Postmus, J. L., Hoge, G. L., Breckenridge, J., Sharp-Jeffs, N., & Chung, D. (2020). Economic Abuse as an Invisible Form of Domestic Violence: A Multicountry Review. Trauma, Violence, & Abuse, 21(2), 261–283. <https://doi.org/10.1177/1524838018764160>
- Rafika, J., & Hasanah, U. (2024). Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan: Mengatasi Monotoni Sumber Mata Pencaharian Turun Temurun di Desa Telaga Jernih. Kesejahteraan Bersama, 1(4), 128–137. <https://doi.org/10.62383/bersama.v1i4.734>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. 3(1), 9–19. <https://doi.org/10.31604/JIM.V3I1.2019.9-19>
- Sherraden, M. S., Birkenmaier, J., & Collins, J. M. (2019). Financial Capability for All: Training Human Service Professionals to Work with Vulnerable Families. Journal of Consumer Affairs, 53(3), 869–876. <https://doi.org/10.1111/JOCA.12229>

- Singh, J. (2017). A Study of Domestic Violence against Women. *International Journal of Research*, 4(9), 1166–1172.
- Siregar, P. D., & Harisman, H. (2024). Tindak pidana kekerasan fisik dalam kekerasan rumah tangga. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9842>
- Stiawati, T., & Indriyany, I. A. (2022). Penyuluhan Optimalisasi Peran Organisasi Wanita Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Tengah Era Globalisasi di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. *Komunitas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.31506/komunitas:jpkm.v2i1.15688>
- Suharnanik, S., & Yulairini, S. (2022). Family Welfare Empowerment (PKK) Role in Set Woman Cooperation to Support Economy Creative Empowerment Based on Community. *Revista De Cercetare Si Interventie Sociala*, 77, 162–173. <https://doi.org/10.33788/rcis.77.10>.
- Susana, A. D., & Rifandi, I. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Putusan No. 666 K/Pid.Sus/2018. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v1i2.1293>
- Tandaju, T., Korompis, M., & Kawatak, S. Y. (2022). Pemberdayaan ibu rumah tangga dalam membangun usaha rumahan di kelurahan sindulang satu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.52159/jla.v2i1.14>
- Vyas, S., & Watts, C. H. (2009). How does economic empowerment affect women's risk of intimate partner violence?. *International Journal of Gender and Development*, 13(2), 1-17.
- World Health Organization (WHO). (2017). Violence against women prevalence estimates, 2018. Retrieved from <https://www.who.int>
- Yulistyawati, T., Wijayanti, R. F., Budiarti, L., Sukma, E. A., & Murtiyanto, R. K. (2017). Pelatihan craft kain perca bagi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga rt.08 rw.05 di kelurahan bandung rejosari kota malang. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 4(1), 31–37. <http://j-abdimas.polinema.ac.id/index.php/abdimas/article/view/28/pdf>.